

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu mensejahterakan masyarakat adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat, dikarenakan erat kaitannya dengan taraf hidup masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan biaya yang sangat besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan sektor pajak. Hal ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bersumber dari masyarakat untuk membiayai semua pengeluaran termasuk biaya pembangunan dan untuk membayar hutang-hutang negara. Sehingga kesadaran membayar pajak harus selalu ditingkatkan dan perlu adanya transparansi sebagai suatu tindakan untuk melihat apakah pemungutan pajak sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Negara berhak memungut pajak kepada warga negara yang tinggal di Indonesia karena di Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan negara terbagi menjadi dua yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan merupakan

sumber dana utama yang sangat mendominasi dalam pendapatan negara Indonesia. Penerimaan pajak dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan bagi pendapatan negara. Adapun realisasi pajak tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel. 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2016-2018 di Indonesia (dalam milyar Rupiah)

No	Sumber Pendapatan	2016	2017	2018
1	Pajak Penghasilan (PPh)	657.162,70	637.859,30	761.200,30
2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	412.213,50	480.724,60	564.682,40
3	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.443,20	16.770,30	17.433,90
4	Cukai	143.525,00	153.288,10	155.504,80
5	Pajak Lainnya	17.154,50	15.672,60	7.614,90
6	Pajak Perdagangan Internasional	35.470,70	39.213,60	42.048,80
7	Bea Masuk	32.472,10	35.066,20	37.600,40
8	Pajak Ekspor	2.998,60	4.147,40	4.448,40

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Berdasarkan Tabel 1 merupakan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada kurun waktu tahun 2016-2018 yang mengalami peningkatan setiap tahun. Salah satu pendapatan pajak terbesar yaitu sektor Pajak Penghasilan. Setiap kegiatan usaha akan berimplikasi pada aspek perpajakan salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan penghasilan dari wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), salah satunya yaitu mengenai jasa kebersihan merupakan salah satu jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 meliputi Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah/Penghargaan/bonus, Sewa, dan sehubungan dengan Jasa-Jasa. Pengenaan Pajak Penghasilan atas jasa kebersihan mempunyai tujuan tertentu yaitu dari sisi *budgetair* untuk memaksimalkan penerimaan negara, apabila dikaitkan dengan kebijakan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan atas jasa kebersihan merupakan

salah satu jenis pajak yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal pelaksanaannya.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor merupakan perusahaan daerah yang dimiliki oleh negara (BUMD) yang bergerak dibidang pengelolaan air minum bagi masyarakat dan merupakan wajib pajak badan selain sebagai subjek pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Tujuan perusahaan adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dan kebutuhan air minum serta mengusahakan manfaat sebesar- besarnya dari kegiatan perusahaan, sehingga meningkatkan sumber serta penambahan pendapatan daerah.

Dalam menjalankan tugasnya PDAM Tirta Kahuripan dituntut untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan juga sebagai pihak pemotong pajak maka dari itu PDAM Tirta Kahuripan ini menerapkan *Self Assesment System* pada PPh Pasal 23. Dokumen-dokumen yang terkait dengan jasa kebersihan di PDAM Tirta Kahuripan meliputi Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, Kwitansi, Faktur Pajak, Daftar Bukti Potong, SPT Masa, Bukti Potong, Surat Perjanjian Kontrak, dan Surat Setoran Pajak.

PDAM Tirta Kahuripan dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas pembayaran jasa penyedia tenaga kebersihan yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Dalam melaksanakan kewajibannya PDAM Tirta Kahuripan harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 khususnya terhadap jasa kebersihan pada PDAM Tirta Kahuripan merupakan kegiatan yang cukup penting terkait dalam membantu kegiatan inti perusahaan tersebut. Transaksi dapat mulai dipotong oleh bagian pajak setelah bagian pembukuan menerima dokumen-dokumen terkait seperti kwitansi dan faktur pajak. Setelah dilakukan pemotongan untuk jasa kebersihan bagian pajak harus melakukan penyetoran yang paling lambat disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak terutang. PDAM Tirta Kahuripan

biasa menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan sistem *online* yaitu *e-Billing*. Langkah terakhir setelah dilakukannya penyetoran, bagian pajak harus melaporkan pajak yang terutang tersebut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan sistem *online* yaitu *e-Filling*.

Oleh sebab itu, dapat dilakukan tinjauan lebih jauh tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa kebersihan yang dilaksanakan di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Maka dari itu perusahaan daerah ini dipilih sebagai objek penulisan tugas akhir. Adapun dilihat dari uraian latar belakang diatas alasan memilih untuk mengangkat sebuah judul yang berhubungan dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sebagai hasil dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan di PDAM Tirta Kahuripan. Judul laporan Praktek Kerja Lapangan tersebut ialah **“Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Kebersihan di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor”**.

I.2 Ruang Lingkup

Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan di PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. PDAM Tirta Kahuripan adalah perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum yang kegiatannya mengolah air minum sehingga layak untuk digunakan masyarakat. Pelanggannya ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan memenuhi kebutuhan air bersih secara memadai kepada masyarakat. Ruang lingkup yang dijelaskan pada laporan ini adalah bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa kebersihan di PDAM Tirta Kahuripan. Sistem pemotongan PPh Pasal 23 yang diterapkan di PDAM Tirta Kahuripan ini bersifat *Self Assesment System* yang artinya memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Dalam laporan PKL ini akan menjelaskan jasa kebersihan, selain yang dilakukan oleh pajak yang ruang

lingkupnya di bidang tenaga kerja dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha kebersihan.

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Selama melakukan PKL di perusahaan sambil mengamati dan ikut menangani/mengurus segala kelengkapan berkas dalam proses pelaporan. Sudah barang tentu hal ini sangat berguna sebagai pengalaman nyata dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. Sehingga tidak hanya mengetahui secara teori tapi aplikasi nyatanya.

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari laporan PKL dibuat ialah sebagai salah satu syarat untuk kelulusan di program Diploma Tiga (D3) untuk program studi Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Merupakan seorang mahasiswi jurusan Akuntansi semester VI yang wajib menyelesaikan tugas ini dalam memenuhi syarat kelulusan tersebut. Perusahaan tempat pengambilan data laporan PKL adalah PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

I.4 Sejarah PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1981 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/III/1981. PDAM Tirta Kahuripan adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang kegiatannya mengolah air minum sehingga layak untuk digunakan oleh masyarakat. Pelayanannya kebutuhan air bersih ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Bogor dan Kota Depok

Pada tanggal 27 September 1988 PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menerima penyerahan sarana dan prasarana air bersih yang berada di wilayah Kota Depok yang semula dikelola oleh Badan Pengelola Air Minum (BPAM). Departemen Pekerjaan Umum diserahkan melalui Pemerintah Jawa Barat dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Sejak saat itu PDAM

Tirta Kahuripan Berkedudukan di Depok dan berkantor pusat di Jl. Legong Raya No. 1 Depok II Tengah.

Pada tahun 1991, Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bogor Nomor III/DPRD/Ps.012/III/1981 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 1991 Tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Bogor, yang berkedudukan di Jl. Gunung Batu Bogor.

Maksud dan tujuan didirikan PDAM Kabupaten DT II Bogor sebagaimana tercantum pada pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten DT II Bogor Nomor : III/DPRD/PS.021/III/1981 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum serta kebutuhan air dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air secara lengkap sehingga siap digunakan oleh masyarakat sebagai sarana kebutuhan air bersih.
2. Mengusahakan manfaat yang sebesar-besarnya dari seluruh kegiatan perusahaan daerah, sehingga meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.
3. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum serta kebutuhan air dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air secara lengkap sehingga siap digunakan oleh masyarakat sebagai sarana kebutuhan air bersih.
4. Mengusahakan manfaat yang sebesar-besarnya dari seluruh kegiatan perusahaan daerah, sehingga meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Sesuai dengan maksud dan tujuan PDAM Kabupaten DT II Bogor menumbuh kembangkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada selama ini melalui tahapan-tahapan pembangunan terjadi peningkatan-peningkatan produksi, distribusi dan kontinuitas

Pada tanggal 11 juni 2003 diresmikan kantor pusat baru yang berkedudukan di Jl. Raya Tegar Beriman oleh Bupati Bogor. Kantor pusat yang baru ini selain lebih representatif juga sangat strategis sehingga dapat memudahkan koordinasi baik secara internal maupun eksternal, sehingga pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat lebih meningkat. Pada kesempatan tersebut diresmikan penggunaan logo dan nama baru PDAM

Kabupaten Bogor menjadi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor oleh Bupati Kabupaten Bogor.

Pendirian PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor pada dasarnya ditujukan untuk memberikan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan bagi masyarakat yang berada di Depok dan Kabupaten Bogor. Namun dengan adanya pemekaran wilayah di Kota Bogor, saat ini terdapat pelanggan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang terletak di wilayah administrative Kota Bogor, sehingga secara keseluruhan wilayah Pelayanan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terdapat di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan beberapa wilayah di Kota Bogor.

Dengan diberlakukannya Undang-Undnag Nomor 15 Tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang ditetapkan pada tanggal

20 April 1999, maka pada tanggal 6 Oktober 2015, PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menyerah terimakan asset dan pegawai PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang ada di Kota Depok kepada PDAM Tirta Asasta Kota Depok, sehingga wilayah pelayanan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor saat ini terdiri dari 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor dengan jumlah Kecamatan yang telah terlayani jaringan perpipaan adalah sebanyak 25 kecamatan dan beberapa wilayah yang terdapat di Kota Bogor.

Tabel 2. Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

No.	Wilayah Administrasi	No.	Wilayah Teknis
1	Nanggung	1	Cabang Leuwiliang
2	Leuwiliang	1.1	Leuwiliang
3	Luwisadeng	1.2	Ciampea
4	Pamijahan	1.3	Cibungbulang
5	Cibungbulang	1.4	Luwisadeng
6	Ciampea	2	Cabang Ciomas
7	Tenjolaya	2.1	Ciomas
8	Dramaga	2.2	Dramaga
9	Ciomas	3	Cabang Kedung Halang

10	Tamansari	3.1	Sukaraja
11	Cijeruk	3.2	Kemang
12	Cigombong	4	Cabang Parung Panjang
13	Caringin	4.1	Parung Panjang
14	Ciawi	4.2	Gunung Sindur
15	Cisarua	4.3	Rumpin
16	Megamendung	5	Cabang Cileungsi
17	Sukaraja	5.1	Cileungsi
18	Babakan Madang	5.2	Gunung Putri
19	Sukamakmur	6	Cabang Ciawi
20	Cariu	6.1	Cisarua
21	Tanjungsari	6.2	Megamendung
22	Jonggol	6.3	Caringin
23	Cileungsi	6.4	Ciawi
24	Klapanunggal	6.5	Cijeruk
25	Gunungputri	6.6	Cigombong
26	Citeureup	7	Cabang Cibinong
27	Cibinong	7.1	Cibinong
28	Bojonggede	7.2	Citeureup
29	Tajurhalang	7.3	Babakan Madang
30	Kemang	7.4	Bojong gede
31	Rancabungur	7.5	Tajur Halang
32	Parung	8	Cabang Jonggol
33	Ciseeng	8.1	Jonggol
34	Gunungsindur	8.2	Cariu
35	Rumpin		
36	Cigudeg		
37	Sukajaya		
38	Jasinga		
39	Tenjo		
40	Parung Panjang		

Sumber: Data PDAM Tirta Kahuripan

I.4.1 Visi

“Menjadi Perusahaan Air Minum Termaju dan Terbaik Di Indonesia”

“Termaju” ditandai dengan tercapainya *sustainability company* meliputi organisasi perusahaan yang solid, manajemen yang efektif, sumber daya manusia yang kompeten dan penerapan teknologi.

Dengan diperolehnya penilaian kinerja perusahaan yang tertinggi menunjukkan perusahaan air minum yang “Terbaik” dan berada di jajaran PDAM terbaik di Indonesia.

I.4.2 Misi

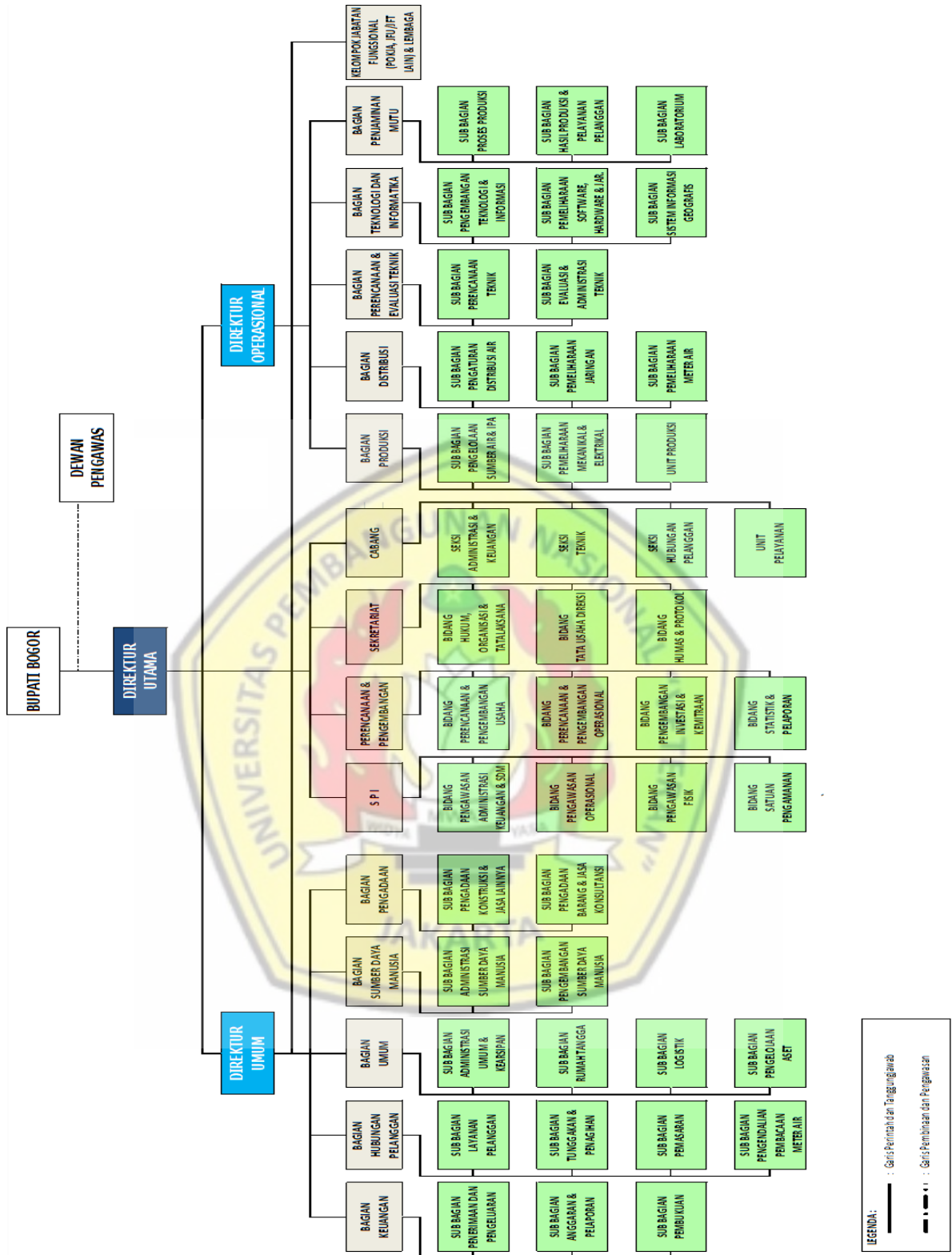
Misi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor selama 5 (lima) tahun kedepan di gambarkan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan air minum dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan persyaratan serta memperhatikan keterjangkauan masyarakat;
2. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Bogor;
3. Meningkatkan pendapatan perusahaan dalam rangka mendukung pengembangan perusahaan dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD);
4. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan;
5. Meningkatkan peran aktif dalam pelestarian lingkungan sumber air baku di wilayah Kabupaten Bogor;
6. Menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Pelanggan, Pemilik serta Pegawai;
7. Berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor;
8. Meningkatkan kegiatan dalam rangka menunjang peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor.

I.5 Struktur Organisasi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi masing-masing dan tentu mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Namun, pada hakekatnya mempunyai prinsip yang sama, yaitu tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Struktur organisasi suatu perusahaan memberikan gambaran tentang posisi dan hubungan antara semua unit kerja yang ada dalam perusahaan sehingga memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi, baik secara vertical maupun horizontal. Struktur organisasi perusahaan yang disusun secara tepat merupakan salah satu unsur terpenting bagi terciptanya pengendalian intern yang baik. Terciptanya suasana kerja yang terorganisir secara sistematis dan terpadu, diperlukan adanya suatu rencana kerja yang terarah serta personil pelaksana rencana yang benar-benar membidangi kerjanya masing-masing, sehingga diperlukan struktur organisasi yang jelas dan nyata. Struktur organisasi tersebut terdapat kerangka hubungan antar unit-unit yang memuat tugas serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor berbentuk garis dan pada manajemen puncak telah dilakukan penataan fungsi dan peran kerja yang lebih koordinatif. Upaya ini salah satu bentuk sistem pengendalian yang dilakukan perusahaan yang diikuti dengan berbagai penyempurnaan struktur organisasi perusahaan. Penyempurnaan tata laksana organisasi perusahaan ini dijabarkan melalui penyederhanaan maupun peningkatan status, fungsi, dan tanggung jawab.



Gambar 1. Struktur Organisasi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Struktur organisasi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bogor No. 9 tahun 1996 yang menyatakan bahwa organisasi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terdiri dari badan pengawas, direksi. Badan pengawas adalah badan yang mewakili bupati dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan PDAM Tirta Kahuripan oleh direksi. Direksi PDAM Tirta Kahuripan terdiri dari Direktur utama, yang membawahi direktur umum, direktur teknik dan kepala bagian.

Berikut uraian secara umum mengenai tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebagai berikut:

1. Direktur Utama
 - a. Merupakan pemimpin tertinggi dalam perusahaan.
 - b. Menentukan arah dan kebijakan perusahaan.
 - c. Mengevaluasi terhadap jalannya kegiatan perusahaan secara keseluruhan.
 - d. Memberikan laporan berkala kepada bupati melalui badan pengawas.
2. Direktur Umum
 - a. Memimpin, mengawasi, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan hubungan masyarakat perusahaan.
 - b. Mengevaluasi terhadap jalannya kegiatan perusahaan dibidang pengelolaan keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan hubungan masyarakat perusahaan dan melakukan penilaian hasil kerja bawahan.
3. Direktur Teknik
 - a. Memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pada perusahaan yang meliputi perencanaan dan desain proyek, pelaksanaan kontruksi dan perbaikan perpipaan, pengaturan dan pengawasan distribusi air serta perawatan bangunan dan instalasi air.
 - b. Mengevaluasi terhadap jalannya kegiatan perusahaan pada bagian produksi, distribusi perencanaan teknik dan bagian perawatan dan melakukan penilaian hasil kerja bawahan.

4. Kepala Satuan Pengawas Intern

- a. Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja perusahaan.
- b. Membagikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada staf pegawai.
- c. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan.
- d. Mengevaluasi dan melakukan penilaian hasil kerja bawahan.
- e. Menyusun rencana kerja untuk pemeriksaan keuangan dan pembukuan, barang-barang rekening air dan non air, proyek-proyek PDAM dan bidang kepegawaian secara berkala serta mengajukan rencana tersebut kepada direktur utama untuk mendapatkan persetujuan.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit organisasi lain, baik secara horizontal maupun vertikal untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persediaan barang-barang, rekening air dan non air serta kas perusahaan, baik dikantor pusat maupun di cabang- cabang pelayanan untuk memastikan kebenarannya dengan pembukuan sebagai pendukung pembuatan laporan keuangan.
- h. Mengadakan pemeriksaan dan pembinaan terhadap masalah pengelolaan kepegawaian dan pelaksanaan disiplin kerja pegawai perusahaan.
- i. Membantu pemeriksa ekstern yang bertugas di perusahaan.
- j. Melaksanakan pemeriksaandan penelitian khusus pada perusahaan berdasarkan instruksi ditektur utama.
- k. Mengadakan koordinasi dengan unsur-unsur pengamanan ekstern.
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada direktur utama.

5. Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan

- a. Menyusun rencana, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang teknik, non teknik dan bidang pedesaan.

- b. Mengevaluasi rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang perusahaan secara keseluruhan terutama yang menyangkut pengembangan operasional perusahaan untuk lima tahun mendatang.
6. Kepala Bagian Keuangan
 - a. Memeriksa dan mengawasi penerimaan, penggunaan dan penyimpanan dari dana perusahaan termasuk alat-alat pembayaran dan kertas berharga serta mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kas kecil sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Secara berkala mengadakan perkiraan dan analisa terhadap penyusunan anggaran belanja.
7. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
 - a. Mengusahakan dan mengawasi proses produksi rekening air dan non air sebagai pendapatan utama perusahaan.
 - b. Merencanakan, mengusahakan dan mengawasi kelancaran penagihan piutang air dan non air.
8. Kepala Bagian Umum
 - a. Mengawasi setiap pemesanan dan pembelian bahan baku dan barang kebutuhan perusahaan setelah disetujui oleh direktur umum. Merencanakan jumlah pengadaan dan persediaan yang sesuai kebutuhan minimum, menetapkan anggaran untuk keperluan tersebut dan sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan pada gudang pemeriksaan.
 - b. Menampung seluruh permintaan barang dan jasa untuk keperluan operasional perusahaan dan memproses pengadaan serta mengeluarkan setelah mendapat persetujuan direktur umum sesuai sistem dan prosedur akuntansi perusahaan yang berlaku.
9. Kepala Bagian Kepegawaian
 - a. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang mencakup pengangkatan, pemindahan, pemberhentian/pensiun, kenaikan pangkat/ golongan/ gaji berkala, cuti pegawai, absensi, dan lain-lain.

- b. Mengevaluasi dan menyusun struktur penggolongan gaji sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
10. Kepala Bagian Produksi
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dari seksi evaluasi sumber dan pengolahan, seksi instalasi dan seksi laboratorium.
 - b. Merencanakan pengembangan produksi air dan mengkoordinasikan pelaksanaan analisis kimia dan bakteriologi sehingga mutu air yang diproduksi atau dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
11. Kepala Bagian Distribusi
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dari seksi-seksi distribusi dan transmisi, meter air, dan pemeliharaan jaringan.
 - b. Mengumpulkan data mengenai keadaan jaringan-jaringan pipa distribusi dan jumlah maupun keadaan meteran air per wilayah distribusi, menganalisa dan memberikan rekomendasi untuk perencanaan rehabilitasi dan mengembangkan jaringan distribusi dalam jangka panjang.
12. Kepala Bagian Perencanaan Teknik
- a. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan persiapan rencana-rencana pelaksanaan dan penelitian atas jalannya proyek.
 - b. Mempersiapkan rancangan proyek pengembangan sumber air baru, sistem transmisi dan distribusi berikut perlengkapan dan peralatan yang diperlukan.
13. Kepala Bagian Perawatan
- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi perawatan dari seluruh bangunan, ruangan, halaman, dari unit-unit pengolahan air.
 - b. Memeriksa dan mengatur pemeriksaan secara berkala serta mengkoordinasikan pelaksanaan dan perawatan instalasi air, mesin-mesin termasuk pelistrikan dan pompa air.

I.6 Kegiatan PDAM Tirta Kahuripan

PDAM Tirta Kahuripan merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang pengelolaan air minum secara lengkap sehingga siap untuk digunakan oleh masyarakat. Pelanggannya ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Bogor dan Kota Depok dengan memenuhi kebutuhan air bersih secara memadai untuk masyarakat. Tujuan perusahaan adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dan kebutuhan air minum serta mengusahakan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan perusahaan, sehingga meningkatkan sumber serta penambahan pendapatan daerah.

Saat ini wilayah yang terlayani oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mencakup 26 kecamatan di Kabupaten Bogor dan 5 kecamatan di Kota Depok dengan jumlah pelanggan mencapai 106.577 pelanggan.

Untuk memudahkan pelayanan bagi para pelanggannya PDAM Tirta Kahuripan Menyiapkan:

1. 8 cabang pelayanan,
2. 7 kantor unit pelayanan,
3. 21 servis point.

Adapun kapasitas produksi dari 31 instalasi pengolahan air bersih yang dimiliki oleh PDAM Tirta Kahuripan mampu memproduksi sebanyak 2.082 liter air/detik, dengan perincian sebagai berikut:

1. 12 instalasi pengolahan air yang mengolah air permukaan (air sungai) dengan kapasitas produksi sebesar 1169 liter/detik.
2. 8 instalasi pengolahan air dari sumber mata air dengan kapasitas produksi sebesar 737 liter/detik.
3. 11 instalasi air dari sumur bor dengan kapasitas produksi sebesar 176 liter/detik.

I.7 Manfaat

Diharapkan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya PKL manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa kebersihan yang dilakukan PDAM Tirta Kahuripan.
2. Memperoleh pengalaman kerja yang tidak pernah di dapat di bangku kuliah sehingga sehingga dapat mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja.
3. Diharap laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa khususnya tentang PPh Pasal 23.

